



SALINAN

BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR 52 TAHUN 2019

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2016-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang : a. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Ponorogo adalah dengan menetapkan indikator kinerja utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Perdayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Bupati wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Pemerintah Kabupaten;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, maka perlu mengatur Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Ponorogo dan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2021 dengan menuangkannya dalam suatu Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya & Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur & Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan DI Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2370);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2010 Nomor 6);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2019 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2016-2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ponorogo.
2. Bupati adalah Bupati Ponorogo.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo.
4. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintahan Kabupaten Ponorogo.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten.
6. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disebut IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.
7. IKU Pemerintah Kabupaten adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Kabupaten.
8. IKU SKPD adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis SKPD.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ponorogo.
10. Kinerja Organisasi adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan organisasi sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategis organisasi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
11. Sasaran Strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan penetapan IKU adalah :

- a. untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan
- b. untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Pasal 3

IKU Pemerintah Kabupaten dan SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB II KEGUNAAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 4

IKU wajib digunakan sebagai dasar untuk :

- a. menetapkan Rencana Kerja Tahun

IKU pada setiap tingkatan

- b. kebutuhan data statistik pemerintah; dan
- c. kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 33 Tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Ponorogo dan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 – 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 21 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 33 Tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Ponorogo dan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 – 2021, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 17 Juni 2019

BUPATI PONOROGO,
TTD.

H. IPONG MUCHLISSONI

Diundangkan di Ponorogo
pada tanggal 17 Juni 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO,

TTD.

AGUS PRAMONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2019 NOMOR 52.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH


CATUR HERTIYAWAN, S.H.
NIP. 19640707 199303 1 008

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR : 52 TAHUN 2019
TANGGAL : 17 JUNI 2019

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2016-2021

.....
.....

BUPATI PONOROGO,

H. IPONG MUCHLISSONI

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR : 52 TAHUN 2019
TANGGAL : 17 JUNI 2019

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
TAHUN 2016-2021**

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

- Instansi** : **Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo**
Tujuan : Terwujudnya pelayanan prima
Tugas : Membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif
Fungsi :
 1. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan Daerah
 2. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja Perangkat Daerah
 3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah
 4. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Daerah
 5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

KINERJA UTAMA/ SASARAN STRATEGIS/ OUTCOME	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Prosentase aspek dalam penyelenggaraan pemerintahan (LPPD) Kabupaten Ponorogo yang memiliki capaian kinerja dengan predikat tinggi	Jumlah aspek dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan predikat tinggi / jumlah seluruh aspek dalam penyelenggaraan pemerintahan X 100	Dokumen laporan LPPD	Bagian Administrasi Pemerintahan Umum
Meningkatnya transparansi, efektivitas dan efisiensi pengadaan barang dan jasa	Cakupan layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik (e-procurement) melalui LPSE	Jumlah paket pengadaan yang dilelang melalui LPSE selesai tepat waktu / jumlah seluruh paket pengadaan X 100	Dokumen laporan PBJ secara elektronik (Procurement)	Bagian Administrasi Pembangunan
	Prosentase realisasi belanja langsung	Jumlah realisasi belanja langsung / jumlah belanja langsung X 100	Dokumen laporan realisasi fisik dan keuangan	Bagian Administrasi Pembangunan

KINERJA UTAMA/ SASARAN STRATEGIS/ OUTCOME	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
Terkendalinya laju inflasi daerah	Laju inflasi daerah	Nilai inflasi tahun N - Nilai inflasi tahun (N-1)/Nilai Inflasi tahun (N-1)X 100	BPS	Bagian Administrasi Perekonomian
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan publik	Prosentase SKPD yang menyusun Laporan Kinerja (LKj) dngan benar dan tepat waktu	Jumlah SKPD yang menyusun LKj dengan benar dan tepat waktu / Jumlah SKPD X 100	Dokumen Laporan Kinerja	Bagian Organisasi
	Prosentase Unit Pelayanan dengan nilai survey kepuasan masyarakat (SKM) baik	Jumlah Unit Pelayanan dengan nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) baik / jumlah Unit Pelayanan yang melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) X 100	Dokumen Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Bagian Organisasi

- Instansi : **Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo**
 Tujuan : Terwujudnya akses pendidikan yang berkualitas bagi seluruh warga
 Tugas : Melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pendidikan
 Fungsi :
 1. Perumusan Kebijakan di bidang pendidikan
 2. Pelaksanaan kebijakan di bidang Pendidikan
 3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan
 4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang pendidikan
 5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya di bidang pendidikan

KINERJA UTAMA/ SASARAN STRATEGIS/ OUTCOME	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PEJELASAN FORMULASI / PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
Meningkatnya pemerataan akses pendidikan Anak Usia Dini, SD, SMP dan Pendidikan Luar Sekolah.	Rata-rata lama Sekolah	$MYS = \frac{1}{P_{15+}} \sum_{i=1}^{P_{15+}}$	BPS	BPS
	Angka harapan lama sekolah.	$HLS_a^t = FK \times \sum_{i=a}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$	BPS	BPS
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	Jumlah murid keseluruhan SD/MI/Paket A ----- x 100 (Jumlah penduduk usia 7 – 12 tahun)	Laporan Individual Sekolah	DINAS PENDIDIKAN
	Angka Partisipasi Sekolah Anak Usia 7-12 Tahun	(Jumlah anak usia 7-12 th yang tertampung dilembaga pendidikan (SD/MI , SMP/MTs dan SMA/SMK) ----- x 100 (jumlah penduduk usia 7-12 th)	Laporan Individual Sekolah	DINAS PENDIDIKAN
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	Jumlah murid keseluruhan SMP/MTs/Paket B	Laporan Individual	DINAS PENDIDIKAN

		----- ----- x 100 (Jumlah penduduk usia 13-15 tahun)	Sekolah	
	AngkaPartisipasi Sekolah Anak Usia 13-15 Th (APtS)	(Jumlah anak usia 13-15 th yang tertampung dilembaga pendidikan (SD/MI , SMP/MTs dan SMA/SMK)----- ----- x 100(jumlah penduduk usia 13-15 th)	Laporan Individual Sekolah	DINAS PENDIDIKAN
	AngkaPartisipasiKasar (APK) PendidikanAnakUsiaDini (PAUD)	umlah peserta didik PAUD Formal (TK-RABATA dan Non Formal) ----- ----- x 100 (Jumlah penduduk usia 4 – 6 tahun)	Laporan Individual Sekolah	DINAS PENDIDIKAN
	Angka Melanjutka dari SD/MI ke SMP/MTs.	(Jumlah Siswa Baru Klas 1 SMP/MTs/PaketB) ----- -- x 100 (Jumlah Lulusan SD/MI)	Laporan Individual Sekolah	DINAS PENDIDIKAN
Peningkatan kompetensi danProfesionalisme Tenaga Pendidik dan Kependidikan.	Guru SD yang telah sertifikasi	(Jumlah guru SD keseluruhan) ----- x 100 (Jumlah Guuru SD/MI bersertivikat)	Laporan Individual Sekolah	DINAS PENDIDIKAN
	Guru SMP yang telah sertifikasi	(Jumlah guru SMP keseluruhan) ----- x 100 (Jumlah Guuru SMP bersertivikat)	Laporan Individual Sekolah	DINAS PENDIDIKAN

- Instansi** : **Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo**
Tujuan : Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan
Tugas : Membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten di bidang kesehatan
Fungsi :
 1. Perumusan kebijakan urusan kesehatan
 2. Pelaksanaan kebijakan urusan kesehatan
 3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan kesehatan
 4. Pelaksanaan administrasi Dinas Kesehatan
 5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

KINERJA UTAMA/ SASARAN STRATEGIS/ OUTCOME	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PEJELASAN FORMULASI / PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI)	Jumlah Ibu yang meninggal karena Hamil, bersalin dan nifas disuatu wilayah pada kurun waktu tertentu dibagi Jumlah Kelahiran Hidup disuatu wilayah pada kurun waktu tertentu dikalikan 100.000	Laporan Program	Dinas Kesehatan
	Angka Kematian Bayi (AKB)	Jumlah Bayi (umur < 1 Tahun) yang meninggal disuatu wilayah pada kurun waktu tertentu dibagi Jumlah Kelahiran Hidup di wilayah dan pada kurun waktu yang sama dibagi 1.000	Laporan Program	Dinas Kesehatan
	Persentase balita gizi buruk	Jumlah balita gizi buruk ditemukan / Jumlah balita x 100%	Laporan Program	Dinas Kesehatan
	Prevalensi balita stunting	Jumlah balita stunting ditemukan / Jumlah balita yang diukur TB x 100%	Laporan Program	Dinas Kesehatan
Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Total dari nilai persepsi per unsur / Total unsur terisi x nilai tertimbang	Laporan Program	Dinas Kesehatan
	Persentase puskesmas terakreditasi	Jumlah puskesmas ditetapkan status akreditasi / jumlah puskesmas x 100%	Laporan Program	Dinas Kesehatan

	Persentase Pemanfaatan Pelayanan Kesehatan oleh Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Jumlah puskesmas dengan kategori aman untuk 3 indikator KBPKP / jumlah puskesmas x 100%	Laporan Program	Dinas Kesehatan
Meningkatnya penemuan dan penanganan penyakit menular dan tidak menular	Prevalensi penyakit HIV/AIDS	Jumlah kasus HIV/AIDS yang masih diobati pada tahun berjalan / Jumlah penduduk pada periode tahun yang sama x 10.000	Laporan Program	Dinas Kesehatan
	Insiden Rate penyakit TB Paru	Jumlah kasus baru penyakit TB paru yang ditemukan dan diobati / Jumlah penduduk x 100.000	Laporan Program	Dinas Kesehatan
	Insiden Rate penyakit DBD	Jumlah kasus baru penyakit DBD yang ditemukan dan diobati / Jumlah penduduk x 100.000	Laporan Program	Dinas Kesehatan
	Prevalensi penyakit Kusta	Jumlah kasus kusta yang masih diobati pada tahun berjalan / Jumlah penduduk pada periode tahun yang sama x 10.000	Laporan Program	Dinas Kesehatan
	Cakupan penyakit Hipertensi	Jumlah penduduk usia >15 tahun yang melakukan pemeriksaan tekanan darah / Jumlah penduduk usia >15 tahun x 100%	Laporan Program	Dinas Kesehatan
	Cakupan penyakit Diabetes	Jumlah penduduk usia >18 tahun yang melakukan pemeriksaan gula darah / Jumlah penduduk usia >18 tahun x 100%	Laporan Program	Dinas Kesehatan

- Instansi** : RSUD Dr. Harjono S. Kabupaten Ponorogo
- Tujuan** : Terwujudnya pelayanan kesehatan yang prima
- Tugas** : Melaksanakan pelayanan kesehatan yang paripurna, dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan pemeliharaan kesehatan perorangan, yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan upaya rujukan
- Fungsi** :
 1. Penyelenggaraan pelayanan medis
 2. Penyelenggaraan pelayanan penunjang medis dan non medis
 3. Penyelenggaraan pelayanan dan asuhan keperawatan
 4. Penyelenggaraan pelayanan rujukan
 5. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan
 6. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan
 7. Pelaksanaan administrasi umum dan keuangan

KINERJA UTAMA/ SASARAN STRATEGIS/ OUTCOME	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PEJELASAN FORMULASI / PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
Peningkatan kualitas layanan RSUD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	$IKM = \frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$ $\text{Bobot nilai penimbang} = \frac{\text{Jumlah bobot}}{\text{Jumlah unsur}}$	Bagian tata usaha	RSUD Dr. Harjono S.
	Indeks Kesembuhan	$\text{Indeks Kesembuhan} = \frac{\text{Total pasien hidup}}{\text{Total pasien hidup + mati}} \times 100 \%$	Bagian perencanaan program	RSUD Dr. Harjono S.

- Instansi** : Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Ponorogo
- Tujuan** : Mewujudkan Infrastruktur Daerah Yang Mantab
- Tugas** : Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang
- Fungsi** : 1. Perumusan kebijakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang
 2. Pelaksanaan kebijakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang
 3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang
 4. Pelaksanaan administrasi Dinas
 5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

KINERJA UTAMA/ SASARAN STRATEGIS / OUTCOME	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
Meningkat nya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana jalan, Jembatan dan Irigasi	Prosentase Panjang Jalan Kabupaten dalam kondisi baik	$\frac{\text{Panjang jalan Kabupaten dalam kondisi baik}}{\text{Panjang seluruh jalan Kabupaten}} \times 100\%$	Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Prosentase Jembatan Kabupaten dalam Kondisi Baik	$\frac{\text{Panjang jembatan Kabupaten dalam kondisi baik}}{\text{Panjang jembatan di Kabupaten}} \times 100\%$	Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Prosentase Penurunan luas daerah genangan	$\frac{\text{Luas wilayah genangan}}{\text{Total luas Wilayah}} \times 100\%$	Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- Instansi** : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ponorogo
- Tujuan** : Mewujudkan kawasan yang nyaman bagi warga masyarakat
- Tugas** : Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten di bidang perumahan dan kawasan permukiman
- Fungsi** : 1. Perumusan kebijakan urusan perumahan dan kawasan permukiman
 2. Pelaksanaan kebijakan urusan perumahan dan kawasan permukiman
 3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan perumahan dan kawasan permukiman
 4. Pelaksanaan administrasi Dinas dan
 5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

KINERJA UTAMA/ SASARAN STRATEGIS/ OUTCOME	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PEJELASAN FORMULASI / PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
Meningkatkan akses masyarakat terhadap pemukiman sehat	Persentase rumah layak huni	$\frac{\text{Jumlah rumah layak huni}}{\text{Jumlah seluruh rumah di wilayah penda yang bersangkutan}} \times 100\%$	Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas PKP
	Persentase rumah tangga pengguna air bersih	$\frac{\text{Jumlah rumah tangga pengguna air bersih}}{\text{Jumlah seluruh rumah tangga}} \times 100\%$	Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas PKP
	Persentase rumah tangga ber Sanitasi	$\frac{\text{Jumlah rumah tangga ber sanitasi}}{\text{Jumlah total rumah tangga}} \times 100\%$	Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas PKP
	Persentase Kawasan Kumuh	$\frac{\text{Luas Kawasan Kumuh}}{\text{Luas Wilayah}} \times 100\%$	Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas PKP
	Persentase bangunan ber IMB	$\frac{\text{Jumlah bangunan ber IMB}}{\text{Jumlah bangunan}} \times 100\%$	Bidang Pertanahan dan Tata Bangunan	Dinas PKP

- Instansi** : **Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo**
- Tujuan** : Meningkatkan peran masyarakat dalam mewujudkan situasi keamanan yang kondusif
- Tugas** : Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
- Fungsi** :
1. Perumusan kebijakan teknis dan strategis di bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
 2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
 3. Pelaksanaan pelayanan umum di bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
 4. Pembinaan, pengendalian, fasilitasi dan pelaksanaan tugas di bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
 5. Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
 6. Pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi kegiatan di bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
 7. Pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Bupati

KINERJA UTAMA/ SASARAN STRATEGIS/ OUTCOME	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PEJELASAN FORMULASI / PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
Meningkatnya rasa aman dan tentram di masyarakat	Angka kriminalitas	Jumlah kriminalitas yang terjadi dikabupaten ponorogo dalam satu tahun	Polres Ponorogo	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Prosentase potensi konflik yang dapat di redam	$\frac{\text{Jumlah potensi konflik yang dapat diredam}}{\text{Jumlah potensi konflik}} \times 100\%$	Laporan Tim FKDM	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Meningkatnya partisipasi Masyarakat dalam politik	Tingkat partisipasi masyarakat dalam politik 1. Pilpres 2. Pilgup 3. Pilbup 4. Pileg	$\frac{\text{Jumlah pemilih yang datang}}{\text{Jumlah Pemilih}} \times 100\%$	Rekapitulasi data, laporan pemantauan perkembangan politik daerah	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

- Instansi** : **Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ponorogo**
- Tujuan** : Mantapnya ketentraman dan ketertiban yang mengarah kepada kondisi kondusif sebagai kota yang lebih maju berbudaya dan religius
- Tugas** : Membantu Bupati dalam penyelenggaran tugas Pemerintahan Daerah di bidang ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan daerah dan peraturan pelaksanaannya
- Fungsi** :
1. Penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang operasional ketentraman dan ketertiban
 2. Pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang operasional ketentraman dan ketertiban
 3. Pelaksanaan penertiban dan penegakan peraturan daerah serta peraturan pelaksanaannya
 4. Penyiapan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain dibidang operasional ketentraman dan ketertiban
 5. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang operasional ketentraman dan ketertiban
 6. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
 7. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan

KINERJA UTAMA/ SASARAN STRATEGIS / OUTCOME	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum serta Penegakan Perda	Prosentase tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketentraman, ketertiban, keindahan)	Jumlah pelanggaran Trantibum yang ditangani dibagi jumlah pelanggaran Trantibum dikali 100%	Bidang ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan kebakaran	SATPOL PP
	Prosentase penurunan pelanggaran Perda	Jumlah pelanggaran Perda yang ditangani dibagi jumlah pelanggaran Perda dikali 100 %	Bidang penegakan perundang-undangan	SATPOL PP
Peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	Cakupan pelayanan pemadaman bencana kebakaran Kabupaten	Jumlah luas WMK Kabupaten dibagi Jumlah luas potensi ancaman kebakaran di Kabupaten dikali 100%	Bidang ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat	SATPOL PP

			dan kebakaran	
	Tingkat waktu tanggap (<i>response time rate</i>) daerah layanan Wilayah Managemen Kebakaran (WMK)	Jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam tingkat waktu tanggap dibagi jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan WMK dikali 100%	Bidang ketertiban Umum, Ketentr aman Masyarakat dan kebakaran	SATPOL PP
	Jumlah Kecamatan/Desa siaga bahaya Kebakaran	Jumlah relawan damkar dibagi jumlah Kecamatan dikali 100%	Bidang ketertiban Umum, Ketentr aman Masyarakat dan kebakaran	SATPOL PP

- Instansi** : **Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ponorogo**
- Tujuan** : Mewujudkan kawasan yang nyaman bagi warga masyarakat
- Tugas** :
1. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan merata
 2. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang – undangan
 3. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana
 4. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanggulangan bencana
 5. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana
 6. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang
 7. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dan belanja daerah
 8. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang – undangan
- Fungsi** :
1. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana secara responsive
 2. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh

KINERJA UTAMA/ SASARAN STRATEGIS/ OUTCOME	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PEJELASAN FORMULASI / PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
Terbentuknya desa tangguh bencana	Jumlah desa tangguh bencana di kawasan rawan bencana	Jumlah desa tangguh bencana dikawasan rawan bencana yang terbentuk	BPBD	BPBD
Terwujudnya penanganan darurat bencana yang responsif	Prosentase penanganan darurat bencana	$\frac{\text{Jumlah kejadian bencana yang ditangani}}{\text{Jumlah kejadian bencana}} \times 100\%$	BPBD	BPBD
	Prosentase penanganan kejadian bencana secara respontime	$\frac{\text{Jumlah kejadian bencana yang dapat ditangani secara respontime}}{\text{Jumlah kejadian bencana}} \times 100\%$	BPBD	BPBD
Terlaksananya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca	Prosentase pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca	$\frac{\text{Jumlah sarpras pasca bencana yang dapat dipulihkan}}{\text{Jumlah sarpras pasca bencana}} \times 100\%$	BPBD	BPBD

bencana	bencana	Jumlah sarana dan prasarana terdampak bencana		
---------	---------	---	--	--

- Instansi** : **Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Ponorogo**
- Tujuan** : Meningkatkan Penanganan PMKS dan Partisipasi PSKS
Meningkatnya Penanganan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Tugas** : Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten dibidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
- Fungsi** : 1. Perumusan kebijakan urusan sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
2. Pelaksanaan kebijakan urusan sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
4. Pelaksanaan administrasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ponorogo;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

KINERJA UTAMA/ SASARAN STRATEGIS/ OUTCOME	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PEJELASAN FORMULASI / PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
Terselesainya PMKS	Persentase Penurunan PMKS	$\frac{\text{Jumlah PMKS yang terselesaikan}}{\text{Jumlah seluruh PMKS}} \times 100\%$	Dinas Sosial P3A	Dinas Sosial P3A
Meningkatnya Penanganan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Prosentase Pengaduan Kasus Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah pengaduan kekerasan perempuan dan anak yang terselesaikan}}{\text{Jumlah pengaduan kasus perempuan dan anak di Komite Perlindungan Perempuan Anak}} \times 100\%$	Dinas Sosial P3A	Dinas Sosial P3A

- Instansi** : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ponorogo
- Tujuan** : Menurunkan Pengangguran Terbuka
- Tugas** : Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dantugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten dibidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi
- Fungsi** :
1. Pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi
 2. Pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta
 3. Perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja
 4. Konsultasi produktivitas pada perusahaan kecil
 5. Pengukuran produktivitas tingkat kabupaten
 6. Pelayanan antar kerja di kabupaten
 7. Penerbitan izin Lembaga Penempatan Tenaga KerjaSwasta (LPTKS) dalam 1 (satu) kabupaten
 8. Pengelolaan informasi pasar kerja dalam kabupaten
 9. Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri (pra dan purna penempatan) di kabupaten
 10. Penerbitan perpanjangan Ijin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) yang lokasi kerja dalam 1 (satu) kabupaten
 11. Pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) kabupaten
 12. Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di kabupaten
 13. Pencadangan tanah untuk kawasan transmigrasi di kabupaten
 14. Penataan persebaran penduduk yang berasal dari 1 (satu) kabupaten
 15. Pengembangan satuan permukiman pada tahap kemandirian

KINERJA UTAMA/ SASARAN STRATEGIS/ OUTCOME	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PEJELASAN FORMULASI / PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
Meningkatnya partisipasi angkatan kerja	Persentase tingkat partisipasi angkatan kerja	$\frac{\text{Angkatan Kerja}}{\text{Penduduk Usia Kerja}} \times 100\%$	Bidang Pemberdayaan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Kepala Dinas Tenaga Kerja
Meningkatnya ketrampilan/ kompetensi tenaga kerja dan produktifitas	Persentase pencari kerja yang ditempatkan sesuai kompetensi	$\frac{\text{Jumlah pencari kerja yang ditempatkan}}{\text{Jumlah pencari kerja yang mendaftar}} \times 100\%$	Bidang Pelatihan dan Produktifitas	Kepala Dinas Tenaga Kerja

kerja			TenagaKerja	
Meningkatnya kondisi hubungan industrial yang kondusif	Persentase upah minimum terhadap Kebutuhan Hidup Layak (KHL)	$\frac{\text{Jumlah survey KHL}}{1 \times \text{Survey}} \times 100\%$	Bidang Hubungan Industrial	Kepala Dinas Tenaga Kerja
Meningkatnya Penempatan transmigran yang berkualitas	Persentase transmigran yang meningkat kesejahteraannya	$\frac{\text{Jumlah realisasi transmigran}}{\text{Jumlah target dari provinsi}} \times 100\%$	Bidang Pemberdayaan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Kepala Dinas Tenaga Kerja

- Instansi** : Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Ponorogo
- Tujuan** : Meningkatnya ketahanan pangan daerah
- Tugas** : Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten di bidang pangan
- Fungsi** : 1. Perumusan kebijakan urusan pangan
 2. Pelaksanaan kebijakan urusan pangan
 3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pangan
 4. Pelaksanaan administrasi Dinas
 5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya

KINERJA UTAMA/ SASARAN STRATEGIS/ OUTCOME	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
Meningkatnya ketahanan pangan daerah	Ketersediaan Pangan Utama a. Beras b. Jagung c. Kedelai d. Ubi Kayu	Jumlah ketersediaan pangan (kg/kap/tahun) Ketersediaan Pangan adalah tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan/atau sumber lain yang berfungsi menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk. $\text{Jumlah ketersediaan pangan} = \frac{\text{Prod. Bibit} - \text{tercecer} \times 1000}{\text{Jumlah bibit penduduk}}$	Neraca Bahan Makanan (NBM) dan Data Ketersediaan Pangan Dinas Ketahanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan
	Skor Pola Pangan Harapan (Konsumsi)	Nilai Skor Pola Pangan Harapan (PPH) adalah Komposisi kelompok pangan utama yang bila dikonsumsi dapat memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya. Semakin tinggi Skor PPH maka konsumsi pangan semakin beragam, bergizi seimbang dan aman. Skor PPH Ideal = 100. (Permentan 65 Tahun 2010 Tentang SPM).	Laporan Analisis PPH Dinas Ketahanan Pangan, Susenas BPS	Dinas Ketahanan Pangan

- Instansi** : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ponorogo
- Tujuan** : Terwujudnya pelestarian fungsi lingkungan hidup
- Tugas** : Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten di bidang lingkungan hidup
- Fungsi** : 1. Perumusan kebijakan urusan lingkungan hidup
 2. Pelaksanaan kebijakan urusan lingkungan hidup
 3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan lingkungan hidup
 4. Pelaksanaan administrasi Dinas
 5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

KINERJA UTAMA/ SASARAN STRATEGIS/ OUTCOME	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
Meningkatnya pengelolaan kebersihan, keindahan dan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu. Diperoleh dari perhitungan excel dengan menghitung terlebih dahulu Indeks Pencemaran Air, Indeks Pencemaran Udara dan Indeks Tutupan Lahan. $\text{IKLH} = (\text{IPA} \times 30\%) + (\text{IPU} \times 30\%) + (\text{ITH} \times 40\%)$ IPA = indeks pencemaran air IPU = indeks pencemaran udara ITH = indeks tutupan hutan	Bidang P2KLS DALH dan Bidang P4LH	Kepala Dinas Lingkungan Hidup
	Anugrah Adipura yang diraih		Bidang PSP	Kepala Dinas Lingkungan Hidup

- Instansi** : Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo
- Tujuan** : Terwujudnya peningkatan kualitas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
- Tugas** : Memimpin, mengkoordinasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengendalikan serta memberikan pembinaan administrasi dibidang kependudukan dan pencatatan sipil
- Fungsi** : 1. Perumusan kebijakan urusan kependudukan dan pencatatan sipil
 2. Pelaksanaan kebijakan urusan kependudukan dan pencatatan sipil
 2. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan kependudukan dan pencatatan sipil;
 3. Pelaksanaan administrasi
 4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

KINERJA UTAMA/ SASARAN STRATEGIS/ OUTCOME	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PEJELASAN FORMULASI / PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
Meningkatnya Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	Prosentase penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP -el)	$\frac{\text{Jumlah KTP - el yang di terbitkan}}{\text{Jumlah wajib KTP - el}} \times 100\%$	Dinas Dukcapil	Dinas Dukcapil
	Prosentase kepemilikan Kartu keluarga	$\frac{\text{Jumlah keluarga yang memiliki Kartu keluarga}}{\text{Jumlah keluarga}} \times 100\%$	Dinas Dukcapil	Dinas Dukcapil
	Prosentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	$\frac{\text{Jumlah KIA yang diterbitkan}}{\text{Jumlah Penduduk usia < 17th}} \times 100\%$	Dinas Dukcapil	Dinas Dukcapil
	Prosentase penduduk yang memiliki akta kelahiran 0 s/d 18 tahun	$\frac{\text{Jumlah Dokumen Kutipan Akta Kelahiran usia 0 s/d 18 tahun yang telah di terbitkan}}{\text{Jumlah Dokumen Kutipan Akta Kelahiran usia 0 s/d 18 tahun yang telah di terbitkan}} \times 100\%$	Dinas Dukcapil	Dinas Dukcapil
	Prosentase akta Kematian	$\frac{\text{Jumlah Kutipan Akta kematian yang telah diterbitkan tahun berjalan}}{\text{Jumlah Kutipan Akta kematian yang telah diterbitkan tahun berjalan}} \times 100\%$	Dinas Dukcapil	Dinas Dukcapil

		Jumlah Kematian tahun berjalan		
	Jumlah lembaga/instansi yang memanfaatkan data kependudukan	Jumlah SKPD dan Lembaga Pelayanan Publik Berbadan Hukum Indonesia yang melakukan Kerjasama dengan Dinas Dukcapil	Dinas Dukcapil	Dinas Dukcapil
Meningkatnya kualitas pelayanan Administrasi Kependudukan	Nilai survey kepuasan masyarakat pelayanan Administrasi Kependudukan	Nilai hasil survey kepuasan masyarakat pelayanan Administrasi Kependudukan	Dinas Dukcapil	Dinas Dukcapil

- Instansi** : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ponorogo
- Tujuan** : Mewujudkan pembangunan desa yang berkelanjutan
- Tugas** : Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten dibidang pemberdayaan masyarakat desa
- Fungsi** : 1. Perumusan Kebijakan urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa
 2. Pelaksanaan kebijakan urusan pemberdayaan masyarakat desa
 3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemberdayaan masyarakat desa
 4. Pelaksanaan administrasi dinas
 5. Pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas dibidang pemberdayaan masyarakat desa
 6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya

KINERJA UTAMA/ SASARAN STRATEGIS/ OUTCOME	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PEJELASAN FORMULASI / PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa	Prosentase desa yang berkembang, maju dan mandiri	$\frac{\text{Jumlah desa berkembang, maju dan Mandiri}}{\text{Jumlah desa}} \times 100\%$	IDM (Indeks Desa Membangun)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- Instansi** : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Ponorogo
- Tujuan** : Meningkatkan Efektivitas Program KKBPK Dalam rangka pengendalian laju pertumbuhan penduduk
- Tugas** : Memimpin, mengkoordinasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengendalikan serta memberikan pembinaan administrasi di bidang pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Keluarga
- Fungsi** :
1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana
 2. Pelaksanaan kebijakan pelayanan umum di bidang pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana
 3. Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga Dinas
 4. Pelaksanaan pengendalian pemantauan dan evaluasi kegiatan di bidang pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana
 5. Pembinaan teknis semua jenis pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana
 6. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati

KINERJA UTAMA/ SASARAN STRATEGIS/ OUTCOME	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PEJELASAN FORMULASI / PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
Meningkatnya Efektifitas Program KB	Persentase Peserta KB aktif	$\frac{\text{Jumlah Peserta KB aktif}}{\text{Jumlah PUS}} \times 100\%$	Laporan Bulanan	Bidang Keluarga Berencana
	Total Fertility Rate (TFR)	$TFR = 5 \times \sum_{i=1}^7 ASFR_i$ <p>ASFR_i = banyaknya bayi menurut kelompok umur wanita ke i</p>	BKKBN	Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan
	Persentase Usia Perkawinan pertama wanita di bawah 20 tahun	$\frac{\text{Jumlah pernikahan wanita usia di bawah 20 Th}}{\text{Jumlah pernikahan}} \times 100\%$	Laporan Bulanan	Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

- Instansi** : Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo
- Tujuan** : Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Sarana dan Prasarana Transportasi di Kabupaten Ponorogo
- Tugas** : Membantu Bupati dalam melaksanakan pemerintahan daerah di Bidang Perhubungan Darat
- Fungsi** :
1. Perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan
 2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Bidang Perhubungan
 3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Perhubungan
 4. Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga Dinas
 5. Pelaksanaan koordinasi dengan lembaga pemerintah/swasta yang berkaitan dengan lingkup tugas di
 6. Bidang Perhubungan
 7. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan Bupati

KINERJA UTAMA/ SASARAN STRATEGIS/ OUTCOME	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PEJELASAN FORMULASI / PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
Meningkatkan kualitas transportasi yang aman dan nyaman	Jumlah pelayanan keselamatan yang sesuai SOP WTN	Jumlah indikator penilaian dalam pelaksanaan WTN	Dinas Perhubungan Dalam Angka	Bidang Lalu Lintas Sarana dan prasaran Dinas Perhubungan
	Persentase penurunan tingkat kecelakaan lalu lintas	$\frac{\text{Jumlah kecelakaan pada tahun}(n)}{\text{Jumlah kecelakaan pada tahun } (n-1)}$	Dinas Perhubungan Dalam Angka	Bidang Pengendalian dan pengamanan lalu lintas
Meningkatkan aksesibilitas obyek vital transportasi daerah	Persentase panjang jalan yang dapat dilalui lancar (kec.50 km/jam)	$\frac{\text{Jumlah panjang jalan yang dilalui dengan lancar (kec.50 km/jam)}}{\text{Jumlah panjang jalan Kabupaten}}$	Dinas Perhubungan Dalam Angka	Bidang Lalu Lintas Sarana dan prasaran Dinas Perhubungan

- Instansi** : Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Ponorogo
- Tujuan** : Meningkatkan Kualitas Sistem Pelayanan Informasi, Komunikasi dan Informatika
- Tugas** : Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten dibidang komunikasi Informatika statistik dan persandian
- Fungsi** : 1. Perumusan kebijakan urusan komunikasi informatika, statistik dan persandian
 2. Pelaksanaan kebijakan urusan urusan komunikasi informatika, statistik dan persandian.
 3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan komunikasi informatika, statistik dan persandian
 4. Pelaksanaan administrasi Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik
 5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

KINERJA UTAMA/ SASARAN STRATEGIS/ OUTCOME	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PEJELASAN FORMULASI / PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
Meningkatnya Pengelolaan Informasi dan Keterbukaan Komunikasi Publik	Jumlah kelompok informasi masyarakat yang dibina dan dibentuk	$\frac{\text{KIM yang aktif}}{\text{Jumlah KIM yang ada}} \times 100\%$	Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik
	Jumlah informasi publik yang tersedia/ dikumpulkan	$\frac{\text{PPID yang tertib administrasi}}{\text{Jumlah PPID se-Kabupaten Ponorogo}} \times 100\%$	Seksi Pelayanan Informasi Publik	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik
Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Sistem pemerintah Berbasis Elektronik di Kabupaten Ponorogo	Persentase layanan publik yang terintegrasi	$\frac{\text{SKPD Kabupaten Ponorogo yang terintegrasi}}{\text{Seluruh SKPD Kabupaten Ponorogo}} \times 100\%$	Seksi Layanan e-Government	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik
Meningkatnya Layanan Data Statistik dan Penyelenggaraan Persandian	Persentase data statistik sektoral yang uptodate	$\frac{\text{Data statistik yang update}}{\text{Jumlah seluruh data statistik sektoral}} \times 100\%$	Seksi Statistik	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik

	Persentase Informasi rahasia yang diamankan	$\frac{\text{Jumlah informasi yang diamankan}}{\text{Jumlah Informasi yang masuk}} \times 100\%$	Seksi Persandian	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik
--	--	--	---------------------	---

- Instansi** : **Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo**
- Tujuan** : Meningkatkan potensi dan daya saing sektor Koperasi dan Usaha Mikro
Meningkatkan Pertumbuhan Industri dan Perdagangan
- Tugas** : Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Industri Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
- Fungsi** : 1. Perumusan kebijakan teknis di bidang industri perdagangan koperasi dan usaha kecil menengah serta pengelolaan pasar
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang industri perdagangan koperasi dan usaha kecil menengah serta pengelolaan pasar
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang industri perdagangan koperasi dan usaha kecil menengah serta pengelolaan pasar
4. Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga Dinas
5. Pelaksanaan koordinasi dengan lembaga pemerintah/ swasta yang berkaitan dengan lingkup tugas di bidang industri perdagangan koperasi dan usaha kecil menengah serta pengelolaan pasar
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

KINERJA UTAMA/ SASARAN STRATEGIS/ OUTCOME	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PEJELASAN FORMULASI / PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
Meningkatnya Koperasi dan Usaha Mikro yang mengalami peningkatan SHU dan Omset	Prosentase koperasi yang mengalami peningkatan SHU	$[Koperasi\ yang\ meningkat\ tahun\ N - Koperasi\ yang\ meningkat\ tahun\ (N-1)] / N-1 \times 100\%$	Data statistic Bid. Koperasi dan UKM	Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro
	Prosentase Usaha Mikro yang meningkat menjadi Usaha Kecil Menengah	$(Usaha\ Mikro\ yang\ meningkat\ menjadi\ Usaha\ Kecil\ Menengah\ / Jumlah\ Usaha\ mikro) \times 100\%$	Data statistic Bid. Koperasi dan UKM	Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro
Meningkatnya nilai perdagangan	Prosentase peningkatan nilai perdagangan	$[Nilai\ perdagangan\ tahun\ N - Nilai\ perdagangan\ tahun\ (N-1)] / [Nilai\ perdagangan\ tahun\ (N-1)] \times 100\%$	Data statistik Bid. Perdagangan dan Pengelolaan pasar	Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro

Prosentase pertumbuhan IKM	Prosentase pertumbuhan IKM	Jumlah IKM Tahun N - (Jumlah IKM tahun N-1) / Jumlah IKM tahun N-1	Data statistik Bid. Industri	Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro
----------------------------	----------------------------	--	------------------------------	--

- Instansi** : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kabupaten Ponorogo
- Tujuan** :
- Tugas** : Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan perijinan dan non perijinan
- Fungsi** : 1. Perumusan kebijakan teknis urusan penanaman modal dan pelayanan perijinan/non perijinan
 2. Pelaksanaan kebijakan pelayanan umum urusan penanaman modal dan pelayanan perijinan/non perijinan
 3. Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga dinas
 4. Pelaksanaan pengendalian pemantauan dan evaluasi kegiatan urusan penanaman modal dan pelayanan perijinan/non perijinan
 5. Pembinaan teknis semua jenis urusan penanaman modal dan pelayanan perijinan/non perijinan
 6. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati

KINERJA UTAMA/ SASARAN STRATEGIS/ OUTCOME	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PEJELASAN FORMULASI / PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
Meningkatnya nilai investasi	Nilai investasi	Nilai investasi lokal PMDN selama 1 tahun dengan ukuran rupiah • Mengukur nilai investasi didasarkan dengan ukuran rupiah	Dokumen data dan informasi perijinan dan investasi	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Meningkatnya kualitas pelayanan perijinan/non perijinan	Nilai survey masyarakat (SKM) terhadap layanan perijinan/non perijinan	Nilai SKM tahun n • Untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan perijinan/non perijinan	Kuisisioner layanan perijinan dan non perijinan yang telah diisi oleh masyarakat	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

- Instansi** : **Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ponorogo**
- Tujuan** : Meningkatkan kompetensi dan profesionalitas organisasi pemuda dan olahraga
- Tugas** : Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten dibidang kepemudaan dan olahraga
- Fungsi** : 1. Perumusan kebijakan urusan kepemudaan dan olahraga
 2. Pelaksanaan kebijakan urusan kepemudaan dan olahraga
 3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan kepemudaan dan olahraga
 4. Pelaksanaan administrasi Dinas
 5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

KINERJA UTAMA/ SASARAN STRATEGIS/ OUTCOME	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PEJELASAN FORMULASI / PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
Peningkatan Prestasi Pemuda Produktif di Kabupaten Ponorogo	Rasio Jumlah Kelompok Pemuda produktif yang berprestasi	$\frac{\sum \text{Hasil seleksi pemuda Pro aktif}}{\sum \text{Jumlah peserta seleksi Pemuda Produktif}}$	Data dari Bidang Layanan Kepemudaan	Dinas Pemuda dan Olahraga
Meningkatkan Prestasi Atlit	Jumlah medali yang diperoleh di tingkat regional dan nasional	\sum Medali yang diperoleh di tingkat regional dan nasional	Laporan kegiatan Bidang Peningkatan Prestasi dan Olahraga Bidang Pembudayaan Olahraga	Dinas Pemuda dan Olahraga

- Instansi** : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ponorogo
- Tujuan** : Mewujudkan layanan prima dan professional untuk lapisan masyarakat guna meningkatkan kualitas SDM di Ponorogo melalui budaya membaca, menulis dan tertib arsip
- Tugas** : Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten dibidang perpustakaan dan kearsipan
- Fungsi** : 1. Perumusan kebijakan dibidang perpustakaan dan kearsipan
 2. Pelaksanaan kebijakan dibidang perpustakaan dan kearsipan
 3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang perpustakaan dan kearsipan
 4. Pelaksanaan administrasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
 5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

KINERJA UTAMA/ SASARAN STRATEGIS/ OUTCOME	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PEJELASAN FORMULASI / PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
Meningkatnya Minat Baca Masyarakat	Indeks minat baca masyarakat	Nilai hasil survey indeks minat baca masyarakat	Bidang Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Meningkatnya kualitas Pelayanan Perpustakaan dan Kearsipan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai hasil survey kepuasan masyarakat unit pelayanan	Bidang Layanan dan Informasi Perpustakaan dan Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Terwujudnya tertib arsip	Prosentase SKPD yang menyelenggarakan kearsipan secara baku	$\frac{\sum \text{SKPD yang telah menyelenggarakan kearsipan secara baku}}{\sum \text{SKPD}}$	Bidang Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

- Instansi** : Dinas Pariwisata Kabupaten Ponorogo
- Tujuan** : Optimalisasi sektor pariwisata
- Tugas** : Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten, dan tugas pembantuan yang diberikan kabupaten dibidang pariwisata dan kebudayaan
- Fungsi** : 1. Perumusan kebijakan urusan pariwisata dan kebudayaan
 2. Pelaksanaan kebijakan urusan pariwisata dan kebudayaan
 3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pariwisata dan kebudayaan;
 4. Pelaksanaan administrasi Dinas pariwisata dan kebudayaan dan
 5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

KINERJA UTAMA/ SASARAN STRATEGIS/ OUTCOME	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PEJELASAN FORMULASI / PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
Meningkatnya sektor Pariwisata Daerah Melalui Pengembangan Pariwisata	Jumlah Kunjungan Wisatawan Lokal dan Nasional	Jumlah Kunjungan Wisatawan Lokal dan Nasional dalam 1 tahun	Dinas Pariwisata	Dinas Pariwisata
	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara dalam 1 tahun	Dinas Pariwisata	Dinas Pariwisata
	Lama Tinggal Wisatawan yang menggunakan jasa akomodasi	Prosentase data pengunjung yang menggunakan akomodasi	Dinas Pariwisata	Dinas Pariwisata
Meningkatnya pelestarian kesenian daerah	Jumlah kesenian yang di lestarikan	Jumlah kesenian yang di lestarikan dalam 1 tahun	Dinas Pariwisata	Dinas Pariwisata

- Instansi** : Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo
- Tujuan** : Mewujudkan sektor Pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan yang mantab dan berdaya saing
- Tugas** : Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten dibidang pertanian dan perikanan
- Fungsi** : 1. Perumusan kebijakan urusan pertanian dan perikanan;
 2. Pelaksanaan kebijakan urusan pertanian dan perikanan;
 3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pertanian dan perikanan;
 4. Pelaksanaan administrasi Dinas Pertanian dan Perikanan
 5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

KINERJA UTAMA/ SASARAN STRATEGIS/ OUTCOME	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PEJELASAN FORMULASI / PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan	Produksi Tanaman Pangan (ton) a. Padi b. Jagung c. Kedelai d. Kacang tanah e. Ubi kayu	Jumlah produksi selama 1 tahun	Data statistik Tanaman Pangan dan Hortikultura	Dinas Pertanian dan Perikanan
	Produktivitas Tanaman Pangan (ku/ha) a. Padi b. Jagung c. Kedelai d. Kacang Tanah e. Ubi Kayu	$\frac{\text{Jumlah Produksi tanaman pangan dalam 1 tahun}}{\text{Luas panen dalam 1 tahun}}$		Dinas Pertanian dan Perikanan
Meningkatnya produksi tanaman perkebunan	Produksi tanaman perkebunan (ton) a. Tebu b. Tembakau c. Kelapa d. Kopi e. Cengkeh f. Kakao	Jumlah produksi selama 1 tahun	Data statistik perkebunan	Dinas Pertanian dan Perikanan

Meningkatnya produksi peternakan	Produksi peternakan a. Daging (kg) b. Susu (liter) c. Telur (kg)	Jumlah produksi selama 1 tahun	Data statistik peternakan	Dinas Pertanian dan Perikanan
Meningkatnya produksi perikanan dan konsumsi ikan	Persentase peningkatan jumlah produksi ikan	$\frac{\text{Jumlah produksi ikan tahun } (n-(n-1))}{\text{Jumlah produksi ikan tahun } n-1} \times 100\%$	Data statistik Perikanan	Dinas Pertanian dan Perikanan
	Persentase peningkatan konsumsi ikan	$\frac{\text{Jumlah konsumsi ikan tahun } (n-(n-1))}{\text{Jumlah konsumsi ikan tahun } n-1} \times 100\%$		

- Instansi** : Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ponorogo
- Tujuan** : Terwujudnya Pelayanan Prima
- Tugas** : Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam pelaksanaan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.
- Fungsi** : 1. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD
 2. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD
 3. Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD
 4. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD

KINERJA UTAMA/ SASARAN STRATEGIS/ OUTCOME	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PEJELASAN FORMULASI / PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi teknis kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Ponorogo	Indek survey kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD terhadap layanan Sekretariat DPRD	Indek hasil survey kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD terhadap layanan Sekretariat DPRD	Dokumen survey kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD terhadap layanan Sekretariat DPRD	Sekretaris DPRD

- Instansi** : **Inspektorat Kabupaten Ponorogo**
- Tujuan** : Mewujudkan Pengawasan Yang Profesional Menuju Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Baik (Good Governance)
- Tugas** : Membantu Bupati Membina Dan Mengawasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Dan Tugas Pembantuan Oleh Perangkat Daerah
- Fungsi** : 1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan
 2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya
 3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati
 4. Penyusunan laporan hasil pengawasan
 5. Pelaksanaan administrasi Inspektorat dan
 6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya

KINERJA UTAMA/ SASARAN STRATEGIS/ OUTCOME	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PEJELASAN FORMULASI / PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Pemerintah Daerah	Persentase (%) SKPD yang memiliki nilai evaluasi Evaluasi AKIP minimal BB	$\frac{\text{Jumlah SKPD nilai evaluasi AKIP minimal BB}}{\text{Jumlah seluruh SKPD}} \times 100\%$	1. Menpan RB dan Biro Organisasi Provinsi Jawa Timur 2. Inspektorat Kab. Ponorogo.	Inspektorat
Meningkatnya Level Kapabilitas APIP	Kapabilitas APIP Kabupaten Ponorogo Level 3	Berdasarkan hasil Penilaian BPKP	BPKP Perwakilan Jawa Timur	Inspektorat
	Maturitas SPI Kabupaten Ponorogo Level 3	Berdasarkan hasil Penilaian BPKP	BPKP Perwakilan Jawa Timur	Inspektorat

- Instansi** : **Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Ponorogo**
- Tujuan** : Mewujudkan perencanaan pembangunan yang partisipatif, selaras dan efektif.
- Tugas** : Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten dibidang perencanaan pembangunan daerah, Penelitian dan Pengembangan
- Fungsi** : 1. Penyusunan kebijakan teknis dibidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah
 2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah
 3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah
 4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dibidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah
 5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

KINERJA UTAMA/ SASARAN STRATEGIS/ OUTCOME	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PEJELASAN FORMULASI / PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
Meningkatnya kualitas perencanaan daerah	Prosentase usulan yang diakomodir di dokumen perencanaan	$\frac{\text{Usulan yang diakomodir dari usulan musrenbang}}{\text{Seluruh usulan musrenbang}} \times 100\%$	Bid. Sarpras Bid. Sosbud Bid. Perekonomian	Bappeda Litbang
	Prosentase keselarasan dokumen perencanaan	$\frac{\text{Rata-rata keselarasan dari dokumen RPJMD ke RKPD, RPJMD ke Renstra, dan Renstra ke Renja}}{3} \times 100\%$		
	Prosentase efektifitas capaian sasaran pembangunan	$\frac{\text{Jumlah Iku yang mencapai target}}{\text{Seluruh IKU}} \times 100\%$		
Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian	Prosentase hasil penelitian yang dapat digunakan dalam pengambilan kebijakan pembangunan	$\frac{\text{Jumlah hasil penelitian yang dimanfaatkan oleh SKPD teknis}}{\text{Jumlah penelitian yang dilaksanakan pada tahun ke-n}} \times 100\%$	Bid. litbang	Bappeda Litbang

- Instansi** : **Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ponorogo**
- Tujuan** : Meningkatkan kemandirian keuangan daerah, pengelolaan keuangan dan aset daerah
- Tugas** : membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan di bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah
- Fungsi** : 1. Penyusunan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah
 2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah
 3. Pemantauan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintah daerah di bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah
 4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

KINERJA UTAMA/ SASARAN STRATEGIS/ OUTCOME	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PEJELASAN FORMULASI / PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
Meningkatnya pendatan asli daerah	Persentase peningkatan PAD	$\frac{\text{Realisasi PAD tahun bersangkutan - PAD tahun lalu}}{\text{Realisasi PAD tahun lalu}} \times 100\%$	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	BPPKAD
	Persentase PAD terhadap total Belanja	$\frac{\text{Realisasi PAD tahun bersangkutan}}{\text{Realisasi total belanja tahun bersangkutan}} \times 100\%$	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	BPPKAD
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Ponorogo	Persentase SKPD yang mengelola keuangan sesuai SAP	$\frac{\text{SKPD yang mengelola keuangan sesuai SAP}}{\text{Total SKPD}} \times 100\%$	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	BPPKAD
	Persentase penurunan nilai temuan BPK	$\frac{\text{Temuan sekarang - temuan tahun lalu}}{\text{Temuan tahun lalu}} \times 100\%$	Daftar temuan BPK	BPPKAD



- Instansi** : **Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Ponorogo**
- Tujuan** : Membangun SDM aparatur Pemerintah Kabupaten Ponorogo yang professional
- Tugas** : Membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten di bidang kepegawaian
- Fungsi** : 1. Penyusunan kebijakan teknis dibidang kepegawaian
 2. pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang kepegawaian
 3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang kepegawaian
 4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dibidang kepegawaian
 5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

KINERJA UTAMA/ SASARAN STRATEGIS/ OUTCOME	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PEJELASAN FORMULASI / PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
Meningkatnya kualitas SDM Aparatur Pemerintah Kabupaten Ponorogo	Prosentase ASN yang ditempatkan sesuai kompetensi	$\frac{\text{Jumlah ASN yang Ditempatkan sesuai Kompetensi}}{\text{Jumlah ASN}}$	Data Kepegawaian DI SIMPEG, Data KP KGB, Data Pengangkatan ASN	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
	Prosentase ASN dengan Nilai SKP baik	$\frac{\text{Jumlah ASN dengan nilai SKP baik}}{\text{Jumlah ASN}}$	Data SKP ASN	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
Meningkatnya Kualitas pelayanan administrasi kepegawaian	Indeks kepuasan Masyarakat Pelayanan kepegawaian	Hasil Pengukuran Nilai IKM	Data Kuesioner pelayanan kepegawaian	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah

- Instansi** : **Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo**
- Tujuan** : Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan kecamatan
- Tugas** :
1. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum
 2. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
 3. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum
 4. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati
 5. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana umum
 6. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan
 7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan
 8. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten yang ada di kecamatan
 9. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan
- Fungsi** :
1. Pemberian supervisi dan pembinaan dalam penyusunan rencana strategis kecamatan sebagai dasar penyusunan rencana kerja kecamatan dan rencana anggaran kecamatan
 2. Pelaksanaan tugas – tugas pembinaan wilayah
 3. Pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di wilayah kerjanya
 4. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di wilayah kerjanya
 5. Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan
 6. Pelaporan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan kepada Bupati
 7. Melaksanakan pelayanan masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya dan
 8. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Bupati

KINERJA UTAMA/ SASARAN STRATEGIS/ OUTCOME	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PEJELASAN FORMULASI / PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Administrasi	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Hasil perhitungan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap tahun	Dokumen SKM	Kecamatan Jenangan
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan,	Prosentase Desa dengan Tingkat Perkembangan Minimal Berkembang yang	Jumlah Desa dengan Tingkat Perkembangan Minimal Berkembang yang meningkat Skor IDM nya	Laporan Hasil Monitoring & Evaluasi Desa	Kecamatan Jenangan

Kewilayahan dan Kemasyarakatan dalam melaksanakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	meningkat Skor Indeks Desa Membangun (IDM) nya	$\frac{\text{Jumlah Desa dengan TingkatPerkembangan Minimal Berkembang seKecamatan}}{\text{Jumlah Desa}} \times 100 \%$	(Data IDM)	
--	--	---	------------	--

- Instansi** : **Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo**
- Tujuan** : Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan kecamatan
- Tugas** :
1. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum
 2. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
 3. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum
 4. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati
 5. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana umum
 6. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan
 7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan
 8. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten yang ada di kecamatan
 9. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan
- Fungsi** :
1. Pemberian supervisi dan pembinaan dalam penyusunan rencana strategis kecamatan sebagai dasar penyusunan rencana kerja kecamatan dan rencana anggaran kecamatan
 2. Pelaksanaan tugas – tugas pembinaan wilayah
 3. Pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di wilayah kerjanya
 4. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di wilayah kerjanya
 5. Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan
 6. Pelaporan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan kepada Bupati
 7. Melaksanakan pelayanan masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya dan
 8. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Bupati

KINERJA UTAMA/ SASARAN STRATEGIS/ OUTCOME	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PEJELASAN FORMULASI / PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
Meningkatnya kualitas Pelayanan kepada masyarakat di Bidang Administrasi.	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi	Hasil perhitungan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap tahun	Dokumen SKM	Kecamatan Ngrayun

Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan dalam melaksanakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan di	Prosentase Desa dengan Tingkat Perkembangan Minimal Berkembang yang mengalami kenaikan Skor IDM	Jumlah Desa Minimal Berkembang yang meningkat skor IDM nya $\frac{\text{Jumlah Desa dengan tingkat perkembangan minimal berkembang se Kecamatan}}{\text{Jumlah Desa Minimal Berkembang yang meningkat skor IDM nya}} \times 100 \%$	Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Desa (Data IDM)	Kecamatan Ngrayun
	Prosentase Desa dengan tingkat perkembangan tertinggal yang mengalami kenaikan Skor IDM	Jumlah Desa tertinggal yang meningkat skor IDM nya $\frac{\text{Jumlah Desa dengan tingkat perkembangan minimal tertinggal se Kecamatan.}}{\text{Jumlah Desa tertinggal yang meningkat skor IDM nya}} \times 100 \%$	Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Desa (Data IDM)	Kecamatan Ngrayun

- Instansi** : **Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo**
- Tujuan** : Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan kecamatan
- Tugas** :
1. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum
 2. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
 3. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum
 4. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati
 5. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana umum
 6. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan
 7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan
 8. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten yang ada di kecamatan
 9. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan
- Fungsi** :
1. Pemberian supervisi dan pembinaan dalam penyusunan rencana strategis kecamatan sebagai dasar penyusunan rencana kerja kecamatan dan rencana anggaran kecamatan
 2. Pelaksanaan tugas – tugas pembinaan wilayah
 3. Pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di wilayah kerjanya
 4. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di wilayah kerjanya
 5. Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan
 6. Pelaporan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan kepada Bupati
 7. Melaksanakan pelayanan masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya dan
 8. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Bupati

KINERJA UTAMA/ SASARAN STRATEGIS/ OUTCOME	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PEJELASAN FORMULASI / PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Administrasi	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi	Hasil perhitungan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap tahun	Dokumen SKM	Kecamatan Babadan
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan, Kewilayahan dan	Prosentase Desa dengan Tingkat Perkembangan Minimal Berkembang yang	Jumlah Desa dengan Tingkat Perkembangan Minimal Berkembang yang meningkat Skor IDM nya	Laporan Hasil Monitoring & Evaluasi Desa	Kecamatan Babadan

Kemasyarakatan dalam melaksanakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	meningkat Skor IDM nya	$\frac{\text{Jumlah Desa dengan Tingkat Perkembangan Minimal Berkembang se Kecamatan Babadan}}{\text{Jumlah Desa}} \times 100 \%$	(Data IDM)	
--	------------------------	---	------------	--

- Instansi** : **Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo**
- Tujuan** : Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan kecamatan
- Tugas** :
1. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum
 2. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
 3. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum
 4. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati
 5. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana umum
 6. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan
 7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan
 8. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten yang ada di kecamatan
 9. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan
- Fungsi** :
1. Pemberian supervisi dan pembinaan dalam penyusunan rencana strategis kecamatan sebagai dasar penyusunan rencana kerja kecamatan dan rencana anggaran kecamatan
 2. Pelaksanaan tugas – tugas pembinaan wilayah
 3. Pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di wilayah kerjanya
 4. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di wilayah kerjanya
 5. Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan
 6. Pelaporan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan kepada Bupati
 7. Melaksanakan pelayanan masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya dan
 8. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Bupati

KINERJA UTAMA/ SASARAN STRATEGIS/ OUTCOME	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PEJELASAN FORMULASI / PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Administrasi	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Hasil perhitungan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap tahun	Dokumen SKM	Kecamatan Ngebel
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kewilayahan dan Kemasyarakatan dalam	Persentase Desa dengan Tingkat Perkembangan Minimal Berkembang	Jumlah Hasil Desa yang Maju dibagi dengan Desa yang Berkembang yang ditindaklanjuti $6 : 8 \times 100 \%$	Laporan Hasil Pembinaan	Kecamatan Ngebel

melaksanakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat				
---	--	--	--	--

- Instansi** : **Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo**
- Tujuan** : Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan
- Tugas** :
1. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum
 2. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
 3. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum
 4. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati
 5. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana umum
 6. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan
 7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan
 8. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten yang ada di kecamatan
 9. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan
- Fungsi** :
1. Pemberian supervisi dan pembinaan dalam penyusunan rencana strategis kecamatan sebagai dasar penyusunan rencana kerja kecamatan dan rencana anggaran kecamatan
 2. Pelaksanaan tugas – tugas pembinaan wilayah
 3. Pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di wilayah kerjanya
 4. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di wilayah kerjanya
 5. Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan
 6. Pelaporan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan kepada Bupati
 7. Melaksanakan pelayanan masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya dan
 8. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Bupati

KINERJA UTAMA/ SASARAN STRATEGIS/ OUTCOME	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PEJELASAN FORMULASI / PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
Meningkatnya kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Administrasi	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Hasil perhitungan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap tahun	Dokumen SKM	Kecamatan Ponorogo
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan melalui Koordinasi Kewilayahan dan	Prosentase Kelurahan dengan Tingkat Perkembangan Minimal Berkembang	$\frac{\text{Jumlah Kelurahan dengan Tingkat Perkembangan Minimal Berkembang}}{\text{Jumlah Kelurahan yang ada}} \times 100\%$	Data Penilaian Kec Ponorogo	Kecamatan Ponorogo

kemasyarakatan dalam melaksanakan pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan				
--	--	--	--	--

- Instansi** : **Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo**
- Tujuan** : Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan kecamatan
- Tugas** :
1. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum
 2. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
 3. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum
 4. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati
 5. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana umum
 6. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan
 7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan
 8. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten yang ada di kecamatan
 9. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan
- Fungsi** :
1. Pemberian supervisi dan pembinaan dalam penyusunan rencana strategis kecamatan sebagai dasar penyusunan rencana kerja kecamatan dan rencana anggaran kecamatan
 2. Pelaksanaan tugas – tugas pembinaan wilayah
 3. Pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di wilayah kerjanya
 4. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di wilayah kerjanya
 5. Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan
 6. Pelaporan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan kepada Bupati
 7. Melaksanakan pelayanan masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya dan
 8. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Bupati

KINERJA UTAMA/ SASARAN STRATEGIS/ OUTCOME	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PEJELASAN FORMULASI / PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Administrasi	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) pelayanan Masyarakat	Hasil perhitungan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap tahun	Dokumen SKM	Kecamatan Slahung
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kewilayahan dan	Prosentase Desa denagn Tingkat Perkembangan Minimal Berkembang yang	Jumlah Hasil Koordinasi yang ditindaklanjuti $\frac{\text{Jumlah Hasil Koordinasi yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Koordinasi}} \times 100 \%$	Laporan Kasi - kasi kecamatan	Kecamatan Slahung

Kemasyarakatan dalam melaksanakan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	meningkat Skor IDM nya	Jumlah semua Koordinasi		
---	------------------------	-------------------------	--	--

- Instansi** : **Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo**
- Tujuan** : Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan kecamatan
- Tugas** :
1. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum
 2. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
 3. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum
 4. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati
 5. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana umum
 6. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan
 7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan
 8. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten yang ada di kecamatan
 9. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan
- Fungsi** :
1. Pemberian supervisi dan pembinaan dalam penyusunan rencana strategis kecamatan sebagai dasar penyusunan rencana kerja kecamatan dan rencana anggaran kecamatan
 2. Pelaksanaan tugas – tugas pembinaan wilayah
 3. Pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di wilayah kerjanya
 4. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di wilayah kerjanya
 5. Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan
 6. Pelaporan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan kepada Bupati
 7. Melaksanakan pelayanan masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya dan
 8. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Bupati

KINERJA UTAMA/ SASARAN STRATEGIS/ OUTCOME	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PEJELASAN FORMULASI / PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Administrasi	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi	Hasil perhitungan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap tahun	Dokumen SKM	Kecamatan Jambon
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan, Kewilayahan dan	Prosentase Desa dengan Tingkat Perkembangan Minimal Berkembang yang	Jumlah Desa dengan Tingkat Perkembangan Minimal Berkembang yang meningkat Skor IDM nya	Laporan Hasil Monitoring & Evaluasi Desa	Kecamatan Jambon

Kemasyarakatan dalam melaksanakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	meningkat Skor IDM nya	$\frac{\text{Jumlah Desa dengan Tingkat Perkembangan Minimal Berkembang se Kecamatan Jambon}}{\text{Total Desa}} \times 100 \%$	(Data IDM)	
--	------------------------	---	------------	--

- Instansi** : **Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo**
- Tujuan** : Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan kecamatan
- Tugas** :
1. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum
 2. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
 3. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum
 4. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati
 5. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana umum
 6. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan
 7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan
 8. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten yang ada di kecamatan
 9. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan
- Fungsi** :
1. Pemberian supervisi dan pembinaan dalam penyusunan rencana strategis kecamatan sebagai dasar penyusunan rencana kerja kecamatan dan rencana anggaran kecamatan
 2. Pelaksanaan tugas – tugas pembinaan wilayah
 3. Pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di wilayah kerjanya
 4. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di wilayah kerjanya
 5. Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan
 6. Pelaporan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan kepada Bupati
 7. Melaksanakan pelayanan masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya dan
 8. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Bupati

KINERJA UTAMA/ SASARAN STRATEGIS/ OUTCOME	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PEJELASAN FORMULASI / PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Administrasi.	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi	Hasil perhitungan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap tahun.	Dokumen SKM	Kecamatan Mlarak
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan dalam	Prosentase Desa dengan Tingkat Perkembangan Minimal Berkembang yang meningkat Skor IDM nya.	Jumlah Desa dengan Tingkat Perkembangan Minimal Berkembang yang meningkat Skor IDM nya $\frac{\text{Jumlah Desa dengan Tingkat Perkembangan Minimal Berkembang}}{\text{Jumlah Desa}} \times 100 \%$	Laporan Hasil Monitoring & Evaluasi Desa (Data IDM)	Kecamatan Mlarak

melaksanakan Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan.	dan di		Jumlah Desa dengan Tingkat Perkembangan Minimal Berkembang se Kecamatan.		
---	-----------	--	--	--	--

- Instansi** : **Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo**
- Tujuan** : Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan kecamatan
- Tugas** :
1. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum
 2. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
 3. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum
 4. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati
 5. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana umum
 6. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan
 7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan
 8. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten yang ada di kecamatan
 9. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan
- Fungsi** :
1. Pemberian supervisi dan pembinaan dalam penyusunan rencana strategis kecamatan sebagai dasar penyusunan rencana kerja kecamatan dan rencana anggaran kecamatan
 2. Pelaksanaan tugas – tugas pembinaan wilayah
 3. Pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di wilayah kerjanya
 4. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di wilayah kerjanya
 5. Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan
 6. Pelaporan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan kepada Bupati
 7. Melaksanakan pelayanan masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya dan
 8. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Bupati

KINERJA UTAMA/ SASARAN STRATEGIS/ OUTCOME	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PEJELASAN FORMULASI / PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat Di bidang Administrasi	Hasil survey kepuasan masyarakat (SKM)	Hasil perhitungan Survey Kepuasan Masyarakat(SKM)setiap tahun	Dokumen SKM	Kecamatan Sampung
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan ,Kewilayahan dan Kemasyarakatan dalam	Persentase Desa dengan Tingkat perkembangan Minimal Berkembang yang meningkat Skor	Jumlah Desa yang tingkat perkembangannya minimal berkembang yang meningkat skor IDM nya	Laporan hasil perkembangan Desa	Kecamatan Sampung

melaksanakan Pembangunan Pemberdayaan Kecamatan	dan di	IDMnya			
--	-----------	--------	--	--	--

- Instansi** : **Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo**
- Tujuan** : Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan kecamatan
- Tugas** :
1. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum
 2. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
 3. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum
 4. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati
 5. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana umum
 6. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan
 7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan
 8. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten yang ada di kecamatan
 9. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan
- Fungsi** :
1. Pemberian supervisi dan pembinaan dalam penyusunan rencana strategis kecamatan sebagai dasar penyusunan rencana kerja kecamatan dan rencana anggaran kecamatan
 2. Pelaksanaan tugas – tugas pembinaan wilayah
 3. Pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di wilayah kerjanya
 4. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di wilayah kerjanya
 5. Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan
 6. Pelaporan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan kepada Bupati
 7. Melaksanakan pelayanan masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya dan
 8. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Bupati

KINERJA UTAMA/ SASARAN STRATEGIS/ OUTCOME	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PEJELASAN FORMULASI / PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Administrasi	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi	Hasil perhitungan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap tahun	Dokumen SKM	Kecamatan Sawoo
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan, Kewilayahan dan	Prosentase Desa dengan Tingkat Perkembangan Minimal Berkembang yang	Jumlah Desa dengan Tingkat Perkembangan Minimal Berkembang yang meningkat Skor IDM nya	Laporan Hasil Monitoring & Evaluasi Desa	Kecamatan Sawoo

Kemasyarakatan dalam melaksanakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	meningkat Skor IDM nya	$\frac{\text{Jumlah Desa dengan Tingkat Perkembangan Minimal Berkembang se Kecamatan}}{\text{Total Desa}} \times 100 \%$	(Data IDM)	
--	------------------------	--	------------	--

- Instansi** : **Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo**
- Tujuan** : Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan kecamatan
- Tugas** :
1. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum
 2. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
 3. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum
 4. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati
 5. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana umum
 6. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan
 7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan
 8. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten yang ada di kecamatan
 9. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan
- Fungsi** :
1. Pemberian supervisi dan pembinaan dalam penyusunan rencana strategis kecamatan sebagai dasar penyusunan rencana kerja kecamatan dan rencana anggaran kecamatan
 2. Pelaksanaan tugas – tugas pembinaan wilayah
 3. Pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di wilayah kerjanya
 4. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di wilayah kerjanya
 5. Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan
 6. Pelaporan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan kepada Bupati
 7. Melaksanakan pelayanan masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya dan
 8. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Bupati

KINERJA UTAMA/ SASARAN STRATEGIS/ OUTCOME	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PEJELASAN FORMULASI / PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Administrasi	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi	Hasil perhitungan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap tahun	Dokumen SKM	Kecamatan Siman
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan, Kewilayahan dan	Prosentase Desa dengan Tingkat Perkembangan Minimal Berkembang yang	Jumlah Desa dengan Tingkat Perkembangan Minimal Berkembang yang meningkat Skor IDM nya	Laporan Hasil Monitoring & Evaluasi Desa	Kecamatan Siman

Kemasyarakatan dalam melaksanakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	meningkat Skor IDM nya	$\frac{\text{Jumlah Desa dengan Tingkat Perkembangan Minimal Berkembang se Kecamatan Siman}}{\text{Total Desa}} \times 100 \%$	(Data IDM)	
--	------------------------	--	------------	--

- Instansi** : **Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo**
- Tujuan** : Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan kecamatan
- Tugas** :
1. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum
 2. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
 3. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum
 4. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati
 5. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana umum
 6. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan
 7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan
 8. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten yang ada di kecamatan
 9. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan
- Fungsi** :
1. Pemberian supervisi dan pembinaan dalam penyusunan rencana strategis kecamatan sebagai dasar penyusunan rencana kerja kecamatan dan rencana anggaran kecamatan
 2. Pelaksanaan tugas – tugas pembinaan wilayah
 3. Pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di wilayah kerjanya
 4. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di wilayah kerjanya
 5. Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan
 6. Pelaporan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan kepada Bupati
 7. Melaksanakan pelayanan masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya dan
 8. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Bupati

KINERJA UTAMA/ SASARAN STRATEGIS/ OUTCOME	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PEJELASAN FORMULASI / PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Administrasi	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi	Hasil perhitungan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap tahun	Dokumen SKM	Kecamatan Sukorejo
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan, Kewilayahan dan	Prosentase Desa dengan Tingkat Perkembangan Minimal Berkembang yang	Jumlah Desa dengan Tingkat Perkembangan Minimal Berkembang yang meningkat Skor IDM nya	Laporan Hasil Monitoring & Evaluasi Desa	Kecamatan Sukorejo

Kemasyarakatan dalam melaksanakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	meningkat Skor IDM nya	$\frac{\text{Jumlah Desa dengan Tingkat Perkembangan Minimal Berkembang se Kecamatan Sukorejo}}{\text{Total Desa}} \times 100 \%$	(Data IDM)	
--	------------------------	---	------------	--

- Instansi** : **Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo**
- Tujuan** : Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan kecamatan
- Tugas** :
1. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum
 2. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
 3. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum
 4. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati
 5. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana umum
 6. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan
 7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan
 8. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten yang ada di kecamatan
 9. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan
- Fungsi** :
1. Pemberian supervisi dan pembinaan dalam penyusunan rencana strategis kecamatan sebagai dasar penyusunan rencana kerja kecamatan dan rencana anggaran kecamatan
 2. Pelaksanaan tugas – tugas pembinaan wilayah
 3. Pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di wilayah kerjanya
 4. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di wilayah kerjanya
 5. Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan
 6. Pelaporan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan kepada Bupati
 7. Melaksanakan pelayanan masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya dan
 8. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Bupati

KINERJA UTAMA/ SASARAN STRATEGIS/ OUTCOME	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PEJELASAN FORMULASI / PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Administrasi	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi	Hasil perhitungan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap tahun	Dokumen SKM	Kecamatan Kauman
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan, Kewilayahan dan	Prosentase Desa dengan Tingkat Perkembangan Minimal Berkembang yang	Jumlah desa yang tingkat perkembangannya minimal berkembang yang meningkat skor IDM nya	Laporan Hasil Monitoring & Evaluasi Desa	Kecamatan Kauman

Kemasyarakatan dalam melaksanakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	meningkat Skor IDM nya		(Data IDM)	
--	------------------------	--	------------	--

- Instansi** : **Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo**
- Tujuan** : Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan kecamatan
- Tugas** :
1. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum
 2. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
 3. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum
 4. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati
 5. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana umum
 6. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan
 7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan
 8. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten yang ada di kecamatan
 9. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan
- Fungsi** :
1. Pemberian supervisi dan pembinaan dalam penyusunan rencana strategis kecamatan sebagai dasar penyusunan rencana kerja kecamatan dan rencana anggaran kecamatan
 2. Pelaksanaan tugas – tugas pembinaan wilayah
 3. Pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di wilayah kerjanya
 4. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di wilayah kerjanya
 5. Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan
 6. Pelaporan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan kepada Bupati
 7. Melaksanakan pelayanan masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya dan
 8. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Bupati

KINERJA UTAMA/ SASARAN STRATEGIS/ OUTCOME	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PEJELASAN FORMULASI / PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Administrasi	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi	Hasil perhitungan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap tahun	Dokumen SKM	Kecamatan Pudak
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan, Kewilayahan dan	Persentase Desa dengan tingkat Perkembangan Minimal berkembang yang	Jumlah desa yang tingkat perkembangannya minimal berkembang yang meningkat skor IDM nya	Laporan hasil perkembangan Desa	Kecamatan Pudak

Kemasyarakatan dalam melaksanakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	meningkat skor IDM nya			
--	------------------------	--	--	--

- Instansi** : **Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo**
- Tujuan** : Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan kecamatan
- Tugas** :
1. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum
 2. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
 3. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum
 4. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati
 5. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana umum
 6. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan
 7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan
 8. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten yang ada di kecamatan
 9. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan
- Fungsi** :
1. Pemberian supervisi dan pembinaan dalam penyusunan rencana strategis kecamatan sebagai dasar penyusunan rencana kerja kecamatan dan rencana anggaran kecamatan
 2. Pelaksanaan tugas – tugas pembinaan wilayah
 3. Pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di wilayah kerjanya
 4. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di wilayah kerjanya
 5. Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan
 6. Pelaporan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan kepada Bupati
 7. Melaksanakan pelayanan masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya dan
 8. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Bupati

KINERJA UTAMA/ SASARAN STRATEGIS/ OUTCOME	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PEJELASAN FORMULASI / PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Administrasi	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi	Hasil perhitungan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap tahun	Dokumen SKM	Kecamatan Jetis
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan, Kewilayahan dan	Prosentase Desa dengan Tingkat Perkembangan Minimal Berkembang yang	Jumlah Desa dengan Tingkat Perkembangan Minimal Berkembang yang meningkat Skor IDM nya	Laporan Hasil Monitoring & Evaluasi Desa	Kecamatan Jetis

Kemasyarakatan dalam melaksanakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	meningkat Skor IDM nya	$\frac{\text{Jumlah Desa dengan Tingkat Perkembangan Minimal Berkembang se Kecamatan}}{\text{Total Desa}} \times 100 \%$	(Data IDM)	
--	------------------------	--	------------	--

- Instansi** : **Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo**
- Tujuan** : Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan kecamatan
- Tugas** :
1. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum
 2. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
 3. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum
 4. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati
 5. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana umum
 6. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan
 7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan
 8. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten yang ada di kecamatan
 9. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan
- Fungsi** :
1. Pemberian supervisi dan pembinaan dalam penyusunan rencana strategis kecamatan sebagai dasar penyusunan rencana kerja kecamatan dan rencana anggaran kecamatan
 2. Pelaksanaan tugas – tugas pembinaan wilayah
 3. Pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di wilayah kerjanya
 4. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di wilayah kerjanya
 5. Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan
 6. Pelaporan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan kepada Bupati
 7. Melaksanakan pelayanan masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya dan
 8. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Bupati

KINERJA UTAMA/ SASARAN STRATEGIS/ OUTCOME	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PEJELASAN FORMULASI / PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Administrasi	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi	Hasil perhitungan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap tahun	Dokumen SKM	Kecamatan Sambit
Meningkatnya Tata Kelola PemerintahanKewilaya	Persentase Desa Tingkat Perkembangan minimal berkembang yang	Jumlah Desa dengan Tingkat Perkembangan Minimal Berkembang yang meningkat Skor IDM nya	Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi	Kecamatan Sambit

<p>han dan Kemasyarakatan dalam Melaksanakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan</p>	<p>meningkat skor IDM- nya.</p>	<p>_____ x 100 % Jumlah Desa dengan Tingkat Perkembangan Minimal Berkembang se Kecamatan</p>	<p>Desa Data IDM</p>	
---	---------------------------------	--	--------------------------	--

- Instansi** : **Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo**
- Tujuan** : Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan kecamatan
- Tugas** :
1. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum
 2. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
 3. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum
 4. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati
 5. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana umum
 6. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan
 7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan
 8. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten yang ada di kecamatan
 9. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan
- Fungsi** :
1. Pemberian supervisi dan pembinaan dalam penyusunan rencana strategis kecamatan sebagai dasar penyusunan rencana kerja kecamatan dan rencana anggaran kecamatan
 2. Pelaksanaan tugas – tugas pembinaan wilayah
 3. Pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di wilayah kerjanya
 4. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di wilayah kerjanya
 5. Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan
 6. Pelaporan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan kepada Bupati
 7. Melaksanakan pelayanan masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya dan
 8. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Bupati

KINERJA UTAMA/ SASARAN STRATEGIS/ OUTCOME	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PEJELASAN FORMULASI / PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
Meningkatnya kualitas Pelayanan kepada masyarakat di Bidang Administrasi	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi	Hasil perhitungan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap tahun	Dokumen SKM	Kecamatan Sooko

Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan dalam melaksanakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	Prosentase Desa dengan Tingkat Perkembangan Minimal Berkembang	$\frac{\text{Jumlah Desa dengan TingkatPerkembangan MinimalBerkembang}}{\text{Jumlah Desa Dalam 1 (satu)Kecamatan}} \times 100\%$	Laporan Tingkat Perkembangan Desa	Kecamatan Sooko
---	--	---	--	--------------------

- Instansi** : **Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo**
- Tujuan** : Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan kecamatan
- Tugas** :
1. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum
 2. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
 3. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum
 4. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati
 5. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana umum
 6. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan
 7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan
 8. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten yang ada di kecamatan
 9. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan
- Fungsi** :
1. Pemberian supervisi dan pembinaan dalam penyusunan rencana strategis kecamatan sebagai dasar penyusunan rencana kerja kecamatan dan rencana anggaran kecamatan
 2. Pelaksanaan tugas – tugas pembinaan wilayah
 3. Pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di wilayah kerjanya
 4. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di wilayah kerjanya
 5. Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan
 6. Pelaporan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan kepada Bupati
 7. Melaksanakan pelayanan masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya dan
 8. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Bupati

KINERJA UTAMA/ SASARAN STRATEGIS/ OUTCOME	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PEJELASAN FORMULASI / PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Administrasi	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi	Hasil perhitungan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap tahun	Dokumen SKM	Kecamatan Balong
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan, Kewilayahan dan	Prosentase Desa dengan Tingkat Perkembangan Minimal Berkembang yang	Jumlah Desa minimal berkembang yang meningkat Skor IDM nya	Laporan hasil monev Desa	Kecamatan Balong

Kemasyarakatan dalam melaksanakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	meningkat Skor IDM nya	$\frac{\text{—————}}{\text{Jumlah Desa seluruhnya}} \times 100 \%$		
--	------------------------	--	--	--

- Instansi** : **Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo**
- Tujuan** : Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan kecamatan
- Tugas** :
1. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum
 2. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
 3. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum
 4. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati
 5. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana umum
 6. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan
 7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan
 8. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten yang ada di kecamatan
 9. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan
- Fungsi** :
1. Pemberian supervisi dan pembinaan dalam penyusunan rencana strategis kecamatan sebagai dasar penyusunan rencana kerja kecamatan dan rencana anggaran kecamatan
 2. Pelaksanaan tugas – tugas pembinaan wilayah
 3. Pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di wilayah kerjanya
 4. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di wilayah kerjanya
 5. Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan
 6. Pelaporan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan kepada Bupati
 7. Melaksanakan pelayanan masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya dan
 8. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Bupati

KINERJA UTAMA/ SASARAN STRATEGIS/ OUTCOME	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PEJELASAN FORMULASI / PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Administrasi	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi	Hasil perhitungan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap tahun	Dokumen SKM	Kecamatan Bungkal
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan, Kewilayahan dan	Prosentase Desa dengan Tingkat Perkembangan Minimal Berkembang yang	Jumlah Desa minimal berkembang yang meningkat Skor IDM nya	Rekapitulasi Indeks Desa Membangun	Kecamatan Bungkal

Kemasyarakatan dalam melaksanakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	meningkat Skor IDM nya	$\frac{\text{Jumlah Desa Berkembang}}{\text{Jumlah Desa Berkembang}} \times 100 \%$	(IDM) Tahun 2019	
--	------------------------	---	------------------	--

- Instansi** : **Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo**
- Tujuan** : Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan kecamatan
- Tugas** :
1. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum
 2. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
 3. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum
 4. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati
 5. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana umum
 6. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan
 7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan
 8. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten yang ada di kecamatan
 9. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan
- Fungsi** :
1. Pemberian supervisi dan pembinaan dalam penyusunan rencana strategis kecamatan sebagai dasar penyusunan rencana kerja kecamatan dan rencana anggaran kecamatan
 2. Pelaksanaan tugas – tugas pembinaan wilayah
 3. Pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di wilayah kerjanya
 4. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di wilayah kerjanya
 5. Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan
 6. Pelaporan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan kepada Bupati
 7. Melaksanakan pelayanan masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya dan
 8. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Bupati

KINERJA UTAMA/ SASARAN STRATEGIS/ OUTCOME	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PEJELASAN FORMULASI / PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Administrasi	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi	$\sum = \frac{\text{Nilai rata-rata indeks kepuasan masyarakat}}{25}$	Kecamatan Badegan	Kecamatan Badegan

<p>Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan dalam melaksanakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan</p>	<p>Prosentase Desa dengan Tingkat Perkembangan Minimal Berkembang yang meningkat Skor IDMya</p>	$\Sigma = \frac{\text{Prosentase desa dengan tingkat perkembangan minimal berkembang}}{5}$	<p>Kecamatan Badegan</p>	<p>Kecamatan Badegan</p>
--	---	--	--------------------------	--------------------------

- Instansi** : **Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo**
- Tujuan** : Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan kecamatan
- Tugas** :
1. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum
 2. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
 3. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum
 4. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati
 5. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana umum
 6. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan
 7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan
 8. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten yang ada di kecamatan
 9. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan
- Fungsi** :
1. Pemberian supervisi dan pembinaan dalam penyusunan rencana strategis kecamatan sebagai dasar penyusunan rencana kerja kecamatan dan rencana anggaran kecamatan
 2. Pelaksanaan tugas – tugas pembinaan wilayah
 3. Pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di wilayah kerjanya
 4. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di wilayah kerjanya
 5. Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan
 6. Pelaporan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan kepada Bupati
 7. Melaksanakan pelayanan masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya dan
 8. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Bupati

KINERJA UTAMA/ SASARAN STRATEGIS/ OUTCOME	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PEJELASAN FORMULASI / PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Administrasi	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi	Hasil perhitungan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap tahun	Dokumen SKM	Kecamatan Pulung
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan, Kewilayahan dan	Prosentase Desa dengan Tingkat Perkembangan Minimal Berkembang	$\frac{\text{Jumlah Desa Tertinggal}}{\text{Jumlah Desa Dalam 1 (satu) Kecamatan}} \times 100\%$	Rekapitulasi Indeks Desa Membangun	Kecamatan Pulung

Kemasyarakatan dalam melaksanakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan			(IDM) Tahun 2019	
	Prosentase Desa dengan Tingkat Perkembangan Minimal Berkembang yang meningkat Skor IDM nya	$\frac{\text{Jumlah Desa Minimal Berkembang}}{\text{Jumlah Desa Dalam 1 (satu) Kecamatan}} \times 100\%$		Kecamatan Pulung

BUPATI PONOROGO,
TTD.

H. IPONG MUCHLISSONI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH

CATUR HERTIYAWAN, S.H.
NIP. 19640707 199303 1 008